

RINGKASAN

Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya belanja daerah. Sebagian besar belanja daerah dialokasikan kepada belanja operasional yang penggunaannya masih belum efektif, salah satunya belanja pegawai yang mendominasi porsi anggaran. Sedangkan belanja modal memiliki porsi yang rendah dibandingkan dengan belanja daerah lainnya. Hal ini dapat memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Proporsi belanja modal pada 35 kabupaten/kota hingga tahun 2023 masih menjadi komponen belanja daerah yang memiliki nilai nominal paling sedikit. Padahal, belanja modal memiliki peranan yang krusial karena berfungsi sebagai investasi jangka panjang pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya porsi belanja modal sangat beragam dan kompleks, salah satunya keterbatasan sumber penerimaan daerah.

Keterbatasan sumber penerimaan daerah dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk belanja modal. Sumber penerimaan daerah yang berperan penting antara lain pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme pengelolaan yang berbeda. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dan kontribusi masyarakat terhadap negara. Sementara itu, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah dan mendukung prioritas pembangunan nasional.

Penelitian ini menggunakan *agency theory* sebagai landasan utama untuk menganalisis hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. *Agency theory* menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya publik dan menyediakan pelayanan publik yang optimal. Namun, hubungan keagenan cenderung terjadi konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Konflik kepentingan dapat terjadi apabila pemerintah daerah sebagai agen memiliki prioritas dan preferensi yang berbeda dengan masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat mengharapkan sumber daya yang mereka berikan dapat diwujudkan dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat turut memperburuk situasi, karena masyarakat tidak selalu memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan hingga keputusan alokasi anggaran.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis kontribusi komponen penerimaan daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini berjudul: Analisis Kontribusi Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pada kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2018-2023.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Pemerintah Daerah. Pemilihan periode 2018-2023 dipertimbangkan karena mencakup masa sebelum, saat terjadi, dan setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh dengan total 210 observasi yang menunjukkan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama enam periode laporan keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan data diperoleh dari laporan realisasi APBD. Data diperoleh melalui *website* DJPK Kemenkeu, PPID masing-masing kabupaten/kota, dan BPS Jawa Tengah. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linear berganda menggunakan *software* SPSS 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengalokasikannya terhadap Belanja Modal. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kontribusi masyarakat sebagai pemilik sumber daya yang berkontribusi pada sistem perpajakan serta kontribusi pemerintah daerah sebagai aparatur negara yang diharapkan dapat mengelola penerimaan pajak daerah dan dana alokasi umum dengan baik dan efektif. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal karena sifat alokasinya yang memiliki kriteria dalam penggunaannya sesuai prioritas nasional dan undang-undang.

Implikasi dari penelitian ini memberikan gambaran penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan belanja modal. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbarui data wajib pajak, meningkatkan pengawasan dan edukasi perpajakan, dan mempermudah sistem pembayaran pajak. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dengan optimal penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sehingga dapat mendukung program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat melalui belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Belanja Modal, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

SUMMARY

Regional governments continue to face challenges in allocating the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), particularly in regional expenditure. Most regional expenditures are allocated to operational spending, which is still not effectively utilized, including personnel expenditure that dominates the budget portion. Meanwhile, capital expenditure has a low portion compared to other regional expenditures. This can have an impact on infrastructure development, health facilities, and other public facilities. This condition occurs in almost all regencies/cities in Central Jawa.

The proportion of capital expenditure in 35 regencies/cities until 2023 remains the regional expenditure component with the smallest nominal value. However, capital expenditure has a crucial role as it function as a long-term government investment through infrastructure development. Factors affecting the low proportion of capital expenditure are diverse and complex, one of which is the limitation of regional revenue sources.

The limitation of regional revenue sources can restrict governments ability to allocate funds for capital expenditure. Important regional revenue sources include local taxes, general allocation funds, and special allocation funds, each having different characteristics and management mechanisms. Local taxes are original regional revenue sources that reflect regional independence and community contribution to the state. Meanwhile, general allocation funds and special allocation funds are transfer funds from the central government aimed to reducing fiscal gaps between regions and supporting national development priorities.

This research uses agency theory as the main foundation to analyze the relationship between local government as agent and society as principal. Agency theory describes that local governments have obligations to manage public resources and provide optimal public services. However, agency relationships tend to experience conflicts of interest due to information asymmetry. Conflicts of interest can occur when local governments as agents have different priorities and preferences from society as principals. Society expects that the resources they provide can be realized in the form of adequate infrastructure and public facilities. Information asymmetry between local government and society also worsens the situation, as society does not always have full access to financial information and budget allocation decisions.

This research is quantitative research that aims to analyze the contribution of regional revenue components to capital expenditure. This research is entitled: Analysis of the Contribution of Regional Taxes, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Regional Government Capital Expenditure. The scope of this research is focused on analyzing regencies/cities in Central Jawa for the period 2018-2023.

The purpose of this research is to analyze the influence of Regional Taxes, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Regional Government Capital Expenditure. The selection of the 2018-2023 period was considered because it covers the period before, during, and after the COVID-19 pandemic. This research uses saturated sampling technique with a total of 210 observations

showing data from 35 regencies/cities in Central Jawa over six finansial reporting periods.. Data collection techniques were carried out through documentation methods, with data obtained from APBD realization reports. Data were obtained through the DPJK ministry of Finance website, PPID of each regency/city website, and BPS Central Jawa website. Data analysis was conducted using multiple linear regression techniques using SPSS 26 software.

The research results show that Local Taxes and General Allocation Funds have a positive effect on Capital Expenditure. This indicates that the greater the Local Tax and General Allocation Fund revenues, the higher the regional ability to allocate them to Capital Expenditure. This is certainly inseparable from the contribution of society as resource owners who contribute to the taxation system and the contribution of local government as state apparatus expected to manage local tax revenues and general allocation funds well and effectively. Meanwhile, Special Allocation Funds do not influence Capital Expenditure due to their allocation nature which has criteria for usage according to national priorities and legislation..

The implications of this research provide important insights for regional goverments in improving capital expenditure management. Regional goverments are expected to manage factors that can provide influence to increase tax revenue by updating taxpayer data, increasing tax supervision and education, and facilitating tax payment systems. In addition, regional goverments are expected to optimally manage general allocation fund and special allocation fund receipts so that they can support development programs that have a direct impact on society through capital expenditure.

Keywords: Regional Expenditure, Capital Expenditure, Regional Tax, General Allocation Fund, Special Allocation Fund.